

PENGUATAN NILAI KEJUJURAN MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

STRENGTHENING OF HONEST CHARACTERS THROUGH ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN SCHOOLS

Alfurkan dan Marzuki

Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo 1, Yogyakarta
email: alfurqon9000@gmail.com

Abstract: this article aims to describe the form of anti-corruption education to strengthen the value of honesty in schools, factors that encourage and inhibit the implementation of anti-corruption education, as well as solutions to overcome obstacles in the implementation of anti-corruption education. The study uses a qualitative approach with a case study type. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis uses interactive analysis. Anti-corruption education is carried out in two ways i.e, the honesty canteen and the learning of Pancasila and Citizenship Education. Supporting factors that influence the honesty reinforcement are teacher modeling, increased worship activities, and participation in organizational activities. The inhibiting factor is that canteens often suffer losses due to lack of supervision and teacher assistance. The solution to overcome these obstacles is to increase cooperation between teachers, increase supervision, carry out regular assistance, and support from families and communities.

Keywords: honesty, anti-corruption education, Pancasila and Civic Education

Abstrak: penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pendidikan antikorupsi untuk penguatan nilai kejujuran di sekolah, faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pendidikan antikorupsi, serta solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui dua cara, yaitu kantin kejujuran dan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Faktor pendukung yang memengaruhi penguatan nilai kejujuran yaitu keteladanan guru, peningkatan aktivitas ibadah, dan keikutsertaan dalam kegiatan organisasi. Faktor penghambatnya adalah kantin sering mengalami kerugian karena kurangnya pengawasan dan pendampingan guru. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kerja sama antar guru, meningkatkan pengawasan, melaksanakan pendampingan secara rutin, dan dukungan dari keluarga serta masyarakat.

Kata Kunci: nilai kejujuran, pendidikan antikorupsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Saat ini, problematika moral bangsa menjadi *trending* topik di berbagai kalangan mulai dari tingkat pelajar hingga tatanan masyarakat umum. Hal tersebut dapat diketahui dengan meningkatnya kebiasaan mencontek di kalangan pelajar, membolos

sekolah, membohongi guru dan orang tua, kekerasan antarpelajar, mencuri, berjudi, merokok, minum-minuman keras, *free sex*, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu penyebabnya adalah pengaruh globalisasi yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan manusia, baik negatif

maupun positif (Asmani, 2012). Lickona mengemukakan bahwa terdapat sepuluh tanda kemerosotan zaman dari remaja yang harus diwaspadai, yang merupakan aspek moral yang berkaitan dengan kemajuan negara. Sepuluh tanda itu yaitu *violence and vandalis; stealing; cheating; disrespect for authority; peer cruelty; bigotry; bad language; sexual precocity and abuse; increasing self-centeredness and declining civic responsibility; dan self destructive behavior* (Lickona, 1992).

Mariato (2002) memaknai pandangan Lickona tersebut dengan 10 tanda merosotnya zaman dari remaja yang mengarah pada kehancuran, yaitu: (a) meningkatnya kekerasan di kalangan pelajar, (b) penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, (c) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, (d) meningkatnya perilaku merusak diri seperti menggunakan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (e) semakin kaburnya pedoman baik dan buruk, (f) menurunnya etos kerja, (g) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (h) tidak adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, (i) sering berbohong, (j) saling memusuhi dan curiga antar sesama.

Maraknya perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial tersebut menandakan degradasi moral bangsa semakin nyata dan mengkhawatirkan. Merujuk dari hasil penelitian Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCKPUSBIH) di lima kota dengan melibatkan 1666 responden, sebanyak 16,35% dari 1.388 responden remaja mengaku telah melakukan hubungan seks di luar nikah atau seks bebas (Asmani, 2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 42,5% responden di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan hubungan seks di luar nikah. Sedangkan 17% responden di Palembang, Sumatra Selatan, Tasik Malaya, dan Jawa Barat juga mengaku melakukan tindakan yang sama. Di Singkawang, Kalimantan

Barat ada sekitar 9% yang menyatakan menganut seks bebas. Lebih parahnya lagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya seks bebas melebihi angka 50% dan Yogyakarta menduduki angka tertinggi dari sekian kota di Indonesia yaitu 97,05% remajanya telah melakukan seks bebas.

Pendapat lain yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengalami kemerosotan moral termuat dalam pendapat Agustian (2008) yang menyatakan terdapat tujuh krisis moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu krisis kejujuran, krisis tanggung jawab, tidak berpikir jauh ke depan, krisis disiplin, krisis kebersamaan, krisis keadilan, dan krisis kepedulian. Berbagai krisis moral tersebut tidak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia, tetapi negara-negara lain.

Uraian di atas menegaskan bahwa terjadi pergeseran tata nilai dan moral dalam diri remaja. Hal ini akan menjadi masalah bagi keberlangsungan suatu bangsa jika remaja sebagai generasi muda penerus bangsa memiliki moral yang buruk, kemungkinan perilaku buruk tersebut akan menjelma dan menjalar pada perilaku buruk lainnya seperti kebiasaan berbohong dan sifat hedonis yang memicu timbulnya perilaku korupsi. Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut menandakan bahwa bangsa Indonesia saat ini khususnya kalangan pelajar telah mengalami kemerosotan moral dan pergeseran tata nilai. Upaya untuk mengatasi dan mencegah meluasnya perilaku menyimpang di kalangan remaja, maka salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menguatkan pendidikan karakter di sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan.

Sekolah dapat menjadi tempat pendidikan karakter untuk membangun karakter peserta didik. Untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan diperlukan peran guru, kepala sekolah, serta orang tua peserta didik karena antara lingkungan sekolah dan keluarga

memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu, ada beberapa unsur penting dalam kurikulum formal di sekolah yaitu *hidden curriculum*. Sebagai kurikulum yang tersembunyi, *hidden curriculum* terkait dengan nilai-nilai yang tidak dapat diukur akan tetapi dapat diperhatikan dari sikap yang dilakukan oleh seseorang.

Kegiatan dalam kurikulum tersembunyi merupakan kegiatan satuan pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat (Amin, 2015). Aktivitas tersebut diharapkan mempunyai kontribusi bagi kesuksesan peserta didik di sekolah khususnya bagi keberhasilan pendidikan karakter.

Nilai kejujuran perlu ditanamkan sejak awal dalam pembentukan karakter peserta didik seperti dalam proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan, dan pembudayaan nilai-nilai karakter. Pengembangan pendidikan karakter harus dikembangkan dengan berbagai model pengembangan yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik yang bermartabat, cerdas, beriman, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga tercipta generasi yang memiliki karakter yang mulia dan menjadikan manusia baik (*being good*) dan cerdas atau *being smart* (Rukiyati, 2013). Tujuan pendidikan nasional tersebut sejalan dengan tujuan PPKn yang membentuk kualitas kepribadian warga negara yang baik, bertanggung jawab, mandiri, dan cinta tanah air (Hakim, et al, 2016). Pendidikan karakter adalah alat yang berpotensi kuat dalam proses kritis anak dan perkembangan remaja, sehingga sekolah memainkan peran sentral (Berkowitz, 2012). Sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter peserta

didik menjadi proaktif, kolaboratif, serta kritis melalui pendidikan karakter. Penerapan pendidikan karakter yang komprehensif dan efektif akan memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu negara.

Pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah secara tidak langsung akan membentuk watak kewarganegaraan pada peserta didik. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran besar dalam mengembangkan pendidikan karakter sebab sekolah berperan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai moral bagi peserta didik melalui serangkaian kegiatan belajar dan ekstrakurikuler yang ada. Pendidikan moral dan kewarganegaraan merupakan elemen penting dari pendidikan pribadi yang utuh karena bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai positif peserta didik dan sikap (Mak, 2014). Dalam hal ini, guru sebagai pelaksana pendidikan karakter di sekolah memiliki peran yang sangat penting.

Sosok guru dijadikan sebagai teladan dan contoh bagi peserta didik. Sukmadinata & Syaodih (2011) menyampaikan bahwa betapapun bagus suatu kurikulum, hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Hal ini menjadi faktor penentu keberhasilan pembentukan karakter termasuk pendidikan antikorupsi. Interaksi edukatif antara guru dan peserta didik berpengaruh pada konsep diri peserta didik termasuk karakter jujur (Nurmalisa, 2018). Pengaruh yang diberikan oleh pribadi guru, peserta didik, suasana pembelajaran, dan lingkungan sekolah berpengaruh terhadap karakter positif peserta didik yang terjadi melalui pendidikan antikorupsi (Arifin, 2011).

Pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membentuk kepribadian yang jujur. Kurikulum yang mengantarkan peserta didik sesuai dengan harapan idealnya, tidak cukup hanya kurikulum yang dipelajari saja, tetapi ada penguatan nilai kejujuran yang secara teoritis sangat rasional memengaruhi peserta didik, baik menyangkut lingkungan

sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan peserta didik dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah dalam hubungan interaksi vertikal dan horizontal (Rosyada, 2004).

Pengalaman yang dapat memengaruhi karakter peserta didik dan menjadi inti pendidikan antikorupsi antara lain kebiasaan sekolah menerapkan disiplin terhadap peserta didiknya, ketepatan guru dalam memulai pelajaran, kemampuan dan cara guru menguasai kelas, kebiasaan guru dalam berpakaian yang rapi, lingkungan sekolah yang rapi, tertib, nyaman, dan kepribadian peserta didik yang mulia. Melalui penguatan nilai kejujuran tentunya peserta didik akan dibimbing dan dipersiapkan untuk masa depan dengan membekali peserta didik banyak keterampilan seperti keterampilan kepribadian dan akhlak yang mulia, kepemimpinan, disiplin, patriotisme, dan kreativitas. Pengembangan pendidikan karakter dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan pendidikan, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta keseharian di rumah dan tatanan masyarakat.

MAN 1 Yogyakarta sebagai salah satu institusi pendidikan yang berkomitmen untuk turut andil dalam menyukseskan pendidikan karakter di Indonesia juga ikut serta dalam menerapkan pendidikan antikorupsi. Penerapan pendidikan antikorupsi di MAN 1 Yogyakarta dilakukan melalui kantin kejujuran. Pendidikan antikorupsi penting untuk dilakukan karena memberantas korupsi dan menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik sudah menjadi tanggung jawab bersama dan perlu dilakukan berbagai cara untuk mengampanyekan pendidikan antikorupsi baik dilakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara terus-menerus. Selain itu penguatan nilai kejujuran dapat dilakukan melalui pembelajaran mata pelajaran PPKn.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran di sekolah yang dirancang

untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat (Cogan, 1999). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dapat membentuk sikap dan perilaku warga negara yang baik. Dalam sebuah negara demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik (Branson, 1998). Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalam persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara (Kerr, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang penguatan nilai kejujuran melalui Pendidikan Antikorupsi di sekolah dilakukan dengan tujuan untuk membahas pendidikan antikorupsi yang telah diterapkan sekolah, faktor pendorong dan faktor penghambat penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah, dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah.

METODE

Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yaitu tentang penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi di sekolah. Jenis studi kasus yang digunakan adalah kasus tunggal holistik dengan desain satu kasus dan menempatkan sebuah kasus sebagai fokus penelitian (Yin, 2009). Penelitian dilaksanakan di MAN 1 Yogyakarta dengan alasan karena sekolah ini terletak di kawasan strategis yang mengedepankan pendidikan karakter, khususnya karakter kejujuran.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data yang telah ditentukan pada penelitian ini, yaitu wakil kepala sekolah bidang

kesiswaan, guru PPKn, guru Bimbingan Konseling, pembina kantin kejujuran, dan peserta didik. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi teknik (Sugiyono, 2015). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman (1994), terdiri atas pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions: drawing/verifying*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan anti korupsi di sekolah

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, dapat merugikan orang banyak dan negara baik dilakukan dengan cara korupsi maupun dengan penggelapan uang negara sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan dan korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila (Nurdjana, 2005). Memberantas korupsi sudah menjadi tanggung jawab semua pihak dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia baik LSM, sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, nilai kejujuran mendesak untuk dikuatkan melalui sekolah-sekolah yang ada Indonesia.

Untuk mengukuhkan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dan jujur, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan di berbagai lingkungan baik itu di sekolah, rumah tangga, maupun dalam lingkungan masyarakat. Salah satu nilai dasar yang perlu ditanamkan dalam pembentukan perilaku antikorupsi adalah nilai kejujuran. Apabila peserta didik sejak dini menerapkan nilai kejujuran di dalam kesehariannya maka untuk jangka waktu ke depannya peserta didik mampu senantiasa berperilaku jujur dan antikorupsi.

Penguatan nilai kejujuran dan pendidikan antikorupsi pada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui kantin

kejujuran, melalui pengarahan, pendampingan, memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum, pelatihan, kegiatan Pramuka, melalui mata pelajaran PPKn, agama, dan berbagai kegiatan lain.

Kantin Kejujuran sebagai Bentuk Pendidikan Anti korupsi di Sekolah

Kantin kejujuran merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu pendek. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengetahui keberhasilan usaha penguatan nilai antikorupsi pada setiap peserta didik, namun yang penting bagi guru-guru yang telah berusaha melakukan sesuatu hal yang positif (Wibowo, 2013; Handoyo, 2009). Implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembiasaan kantin kejujuran merupakan usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan atau memberantas korupsi, dan dapat menjadi tempat untuk penguatan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab kepada peserta didik sejak dini. Keberadaan kantin kejujuran dapat memberikan kontribusi dalam membentuk tanggung jawab, mandiri, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi.

Penerapan kantin kejujuran merupakan praktik antikorupsi dan cara untuk penguatan kejujuran pada peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Kantin kejujuran harus diterapkan sejak usia dini karena kantin kejujuran melatih peserta didik untuk berbicara dan berbuat apa adanya, tanpa menutupi dengan kebohongan (Wibowo, 2012).

Penguatan nilai kejujuran melalui kantin kejujuran sudah berjalan dengan baik. Kantin kejujuran yang ada di sekolah dalam pelaksanaannya dikelola oleh peserta didik yang didampingi oleh pembimbing kantin kejujuran. Kantin kejujuran ditempatkan di tempat yang strategis seperti aula, ruang guru, di dalam kelas, dan luar kelas. Semua transaksi berjalan sesuai dengan kesadaran membayar berapa harga barang yang dibeli. Kantin dibiarkan terbuka tanpa dijaga

oleh kasir, semua barang ditempeli label harga dan pembeli membayar dengan memasukkan uang ke dalam sebuah kotak. Jika uang yang dimasukkan ke kotak perlu kembalian, maka pembeli mengambil kembaliannya sendiri. Semua transaksi berjalan tanpa pengawasan, hanya berbekal kejujuran. Implementasi kantin kejujuran menekankan pada pembiasaan yang sesuai dengan perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kantin kejujuran yaitu disiplin, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, keadilan, keterbukaan, dan kepedulian.

Pembentukan kantin kejujuran di sekolah diharapkan dapat melatih kemandirian peserta didik serta menimbulkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini, khususnya adalah nilai kejujuran. Kantin kejujuran dapat dijadikan sebagai media dalam menyalurkan pendidikan nilai, sebagai sarana untuk penguatan kejujuran. Kantin kejujuran juga digunakan untuk penguatan sikap antikorupsi dan diharapkan menjadi benih-benih antikorupsi kelak (Rabi & Nachrowie, 2015; Gurning, et al, 2014).

Banyak guru di sekolah yang mengklaim bahwa penerapan kantin kejujuran dapat membawa dampak positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penguatan nilai kejujuran kepada peserta didik, dapat melatih kejujuran peserta didik, peserta didik belajar berperilaku jujur dan bersikap patuh ketika tidak ada orang yang mengawasi, belajar jujur kepada diri sendiri, secara langsung dapat menyentuh kesadaran dan sikap peserta didik. Sebuah nilai kehidupan yang menjadi cikal bakal hidup terbebas dari korupsi.

Kantin kejujuran memiliki tujuh tujuan (Wibowo, 2012). Pertama, pentingnya penguatan nilai-nilai kejujuran pada peserta didik karena merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dan dibekali dengan ilmu pengetahuan. Penerapan kantin kejujuran di setiap sekolah sebagai wadah

untuk peserta didik membekali diri dengan sikap antikorupsi, dan sebagai fondasi awal untuk peserta didik ketika dewasa kelak dengan pembiasaan sikap jujur. Kedua, kantin kejujuran yang diterapkan sejak sedini mungkin guna membentuk sikap dan mental antikorupsi yang lebih baik. Dengan demikian, peserta didik tersebut lebih mandiri dan akan menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik untuk masa depan Bangsa Indonesia. Ketiga, kantin kejujuran menjadi media yang tepat untuk penguatan nilai kejujuran sejak dini. Keempat, kantin kejujuran sebagai strategi Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi yaitu preventif, represif, dan edukatif. Kelima, kantin kejujuran sebagai proses pembiasaan pembentukan perilaku dan karakter jujur peserta didik di sekolah dan sebagai sarana mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang telah diajarkan dalam sekolah. Keenam, kantin kejujuran melatih peserta didik untuk berperilaku jujur, menyampaikan sesuatu dengan apa adanya, melatih peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diberikan. Ketujuh, kantin kejujuran melatih peserta didik untuk taat dan patuh terhadap norma, tata tertib, ketentuan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kantin kejujuran dapat memberikan pembiasaan dalam diri peserta didik di sekolah. Pembiasaan sikap jujur dan tanggung jawab dapat melatih peserta didik di sekolah untuk selalu bersikap tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan dan berperilaku jujur dengan membayar dan mengambil uang kembalian. Pembiasaan dengan cara bertransaksi di kantin kejujuran tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi peserta didik untuk selalu berbuat jujur. Peserta didik diberi kepercayaan sepenuhnya dalam melakukan transaksi di kantin kejujuran dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

Mata Pelajaran PPKn sebagai Bentuk Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis yang harus dimiliki peserta didik agar kompetensi peserta didik dapat diterapkan dalam bentuk partisipasi (Sapriya & Winataputra, 2004). Oleh karena itu, pembelajaran PPKn harus bertumpu pada kompetensi kewarganegaraan untuk semua jenjang. Pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang harus diajarkan eksplisit dan sistematis pada setiap tingkat kelas dan harus diintegrasikan ke dalam seluruh kurikulum. Hal ini harus menjadi salah satu titik fokus utama di setiap kelas dan membantu peserta didik untuk mendapatkan keterampilan dalam studi sosial. Kurikulum membantu peserta didik untuk mendapatkan keterampilan seperti argumentasi kritis yang merupakan keterampilan penting untuk kewarganegaraan demokrasi aktif (Doganay, 2012). PKn mempunyai peran penting untuk mendidik anak yang berkarakter baik. Mata pelajaran PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai andil yang besar untuk mencerdaskan anak bangsa dan taat terhadap aturan yang berlaku (Halstead & Pike, 2006).

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah memupuk kesadaran kewajiban asasi peserta didik dalam usaha pembelaan negara dengan dijiwai perilaku cinta tanah air serta dalam usaha pertahanan keamanan negara dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berpola pikir komprehensif integral. Tujuan dari proses pembelajaran PKn adalah untuk menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berperan serta/berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya (Bakry, 2014).

PPKn juga memiliki tujuan untuk penguatan nilai karakter. Nilai-nilai yang ada dalam PKn yaitu nilai yang bersangkungan

dengan masyarakat umum, pendidikan moral yang peduli dengan kebajikan pribadi atau kualitas karakter seperti nilai-nilai masyarakat (Halstead & Pike, 2006). Pengintegrasian pendidikan karakter dan PKn merupakan salah satu pendekatan yang komprehensif dan efektif (Arthur, Davies & Hahn, 2008). Pernyataan tersebut mempertegas keefektifan PKn dan pendidikan karakter yang diintegrasikan menjadi satu kesatuan dalam pendidikan.

PKn dan pendidikan karakter merupakan satu kesatuan yang utuh. Ada keterkaitan antara PKn dan pendidikan karakter (Darling, 2002; Althof & Berkowitz, 2006). Pendidikan karakter merupakan pendekatan khusus pada kajian moral dan nilai-nilai pendidikan, yang secara terkait berkaitan erat dengan PKn (Arthur, et al, 2005). Di Indonesia, PKn tidak hanya terbatas pada pembentukan suatu kepribadian yang mengindonesiakan atau Pendidikan Pancasila saja. Akan tetapi, PKn juga membahas perilaku sosial yang terdapat dalam masyarakat, termasuk pembentukan karakter bangsa. Dengan mempelajari PPKn diharapkan masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter baik (Fadil, et al, 2013).

Karakter yang baik merupakan tujuan yang ingin dicapai dari PKn. Berkaitan dengan tujuan PKn yang ingin membentuk karakter baik warga negara, maka seorang guru PPKn merupakan ujung tombak pembelajaran PKn di sekolah harus mampu mendidik nilai, moral, dan karakter kepada peserta didiknya (Lickona, 1991; Kerr, 1999; Patrick & Vontz, 2001).

Tujuan PPKn tersebut sejalan dengan visi misi sekolah yang selalu menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter, salah satunya karakter kejujuran. Melalui guru PPKn yang selalu mengutamakan nilai kejujuran dalam lingkungan sekolah yaitu berlaku jujur dalam ulangan, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester diharapkan ketika peserta didik tersebut terjun ke masyarakat dapat menjaga nama baik sekolahnya. Lingkungan yang kondusif

dan anti terhadap perbuatan melanggar aturan mampu membentuk peserta didik yang baik dan dapat membawa perubahan pada kehidupan masyarakat.

Faktor Pendorong dan Penghambat Penguatan Nilai Kejujuran melalui Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Penguatan nilai kejujuran tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penguatan nilai kejujuran, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam penguatan nilai kejujuran. Berikut ini deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi di sekolah.

Faktor Pendukung Penguatan Nilai Kejujuran

Keteladan dan contoh yang baik dari guru-guru merupakan salah satu faktor pendorong penguatan nilai kejujuran. Selain memberikan contoh dan keteladanan, program ibadah dan pengajian yang secara rutin juga menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan penguatan nilai kejujuran. Faktor pendorong yang ketiga adalah keikutsertaan peserta didik dalam organisasi. Sekolah banyak mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yaitu basket, peleton inti, desain grafis, jurnalistik, paduan suara, satgas anti narkoba, *tahfidz* Al Qur'an, mansa *coustik*, hadroh, pramuka, majelis permusyawaratan sekolah, peleton inti, karya ilmiah remaja, bulu tangkis, futsal, tenis meja, Palang Merah Remaja (PMR), kaligrafi, pencinta alam, Bahasa Mandarin, OSIS, paduan suara, Pramuka, pencak silat, tari, futsal, dan MTQ. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut selalu melatih dan membina peserta didik untuk mengekspresikan dirinya sesuai bakat minat yang ada dalam diri peserta didik sehingga melalui kegiatan tersebut peserta didik dapat mengetahui cara mengelola kegiatan dalam organisasi. Bukan hanya cara mengelola kegiatan organisasi akan tetapi ada nilai-nilai yang

dapat diambil dalam kegiatan tersebut yaitu nilai kejujuran yang diterampilkan melalui cara pengelolaan manajemen dalam organisasi, administrasi organisasi, surat-menyurat, maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan nilai kejujuran peserta didik sehingga melalui kebiasaan tersebut peserta didik dapat merasakan manfaatnya.

Dalam pembelajaran PPKn, ada beberapa aturan yang mendorong terbentuknya nilai kejujuran yaitu dengan dilarang untuk mencontek, apabila menyalin di internet harus dengan mencantumkan sumbernya, dibiasakan berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Penerapan SOP keterlambatan, buku piket, upacara bendera merupakan kegiatan rutin untuk mendorong penguatan nilai kejujuran peserta didik.

Faktor Penghambat Penguatan Nilai Kejujuran

Ada beberapa faktor penghambat yang dapat memengaruhi penguatan nilai kejujuran tidak berhasil secara maksimal. Pertama, lingkungan sekitar peserta didik yang kurang kondusif. Kurangnya kesadaran orang tua untuk memperhatikan, perhatian, dan peduli terhadap tingkah laku anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak berperilaku jujur di kantin kejujuran, kurangnya kedisiplinan dan juga kurangnya kesadaran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, orang tua dituntut agar dapat memilih lingkungan yang mendukung pendidikan karakter anak-anak mereka dan menghindari kondisi lingkungan masyarakat yang buruk. Sebab ketika anak berada di lingkungan masyarakat yang kurang baik, maka akan berdampak buruk pada perkembangan kepribadian atau karakter anak tersebut. Begitu juga sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal bagi seorang anak, orang tua perlu memilih lingkungan yang mendukung dari masyarakat setempat dan memungkinkan terselenggaranya pendidikan tersebut (Kurniawan, 2013). Pendapat tersebut menegaskan bahwa keberhasilan mendidik anak bergantung

pada dukungan lingkungan.

Faktor penghambat yang kedua berasal dari pribadi peserta didik yang belum berkembang dengan baik. Fenomena yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran dan kejujuran dari peserta didik sehingga ada peserta didik yang mengambil tanpa membayar, ada juga yang mengambil lebih banyak tetapi dihitungnya hanya beberapa, mengambil uang kembalian lebih, dan ada juga yang berutang tetapi lupa untuk membayarnya. Hal inilah yang menyebabkan kantin kejujuran sering rugi. Meskipun demikian semangat guru yang ada di sekolah tetap tinggi untuk terus memperjuangkan kejujuran peserta didik karena kejujuran adalah salah satu fondasi atau modal untuk peserta didik supaya menjadi orang baik dan sukses. Faktor penghambat yang ketiga adalah keterbatasan guru dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan. Guru mengalami kesulitan mengelola dan mengawasi kantin kejujuran karena waktu yang terbatas dan jam mengajar yang banyak. Guru mengalami kejenuhan dan kebosanan sehingga muncul sikap tidak mau tahu. Kurangnya pendampingan dan pengawasan dari guru membuat peserta didik yang mencontek dan melakukan kesalahan yang dapat membahayakan dirinya.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Penguatan Nilai Kejujuran di Sekolah

Lingkungan keluarga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi yang berfungsi dalam pembentukan karakter atau kepribadian sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk keagamaan. Pengalaman hidup bersama di lingkungan keluarga memberi andil yang besar bagi pembentukan kepribadian anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang cukup efektif dan efisien dalam upaya mengantarkan generasi penerus dalam membekali kemampuan diri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi generasi yang handal, terampil, dan tangguh. Keluarga yang

harmonis, rukun, dan damai memengaruhi kondisi psikologis dan karakter seorang anak. Begitupun sebaliknya, anak menjadi kurang berbakti bahkan melakukan tindakan di luar moral kemanusiaan, disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam lingkungan keluarga (Salim, & Kurniawan, 2012).

Meskipun setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bukan berarti seumur hidup selalu dekat dan melakukan kebaikan. Sangat mungkin dalam perkembangan hidupnya justru berbelok arah kepada perbuatan yang negatif. Potensi positif mungkin saja tetap positif tetapi mungkin juga berubah menjadi negatif. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah pengaruh lingkungan. Namun demikian jika tidak terdapat pengaruh-pengaruh yang berlawanan, seorang anak sesungguhnya tergerak mewujudkan fitrahnya secara berkesinambungan sepanjang hidup (Mohamed, 1997).

Pendapat tersebut menegaskan bahwa penguatan nilai kejujuran pada anak tentu harus didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman karena timbulnya rasa aman dan kebaikan peserta didik disebabkan oleh lingkungan dan masyarakat yang aman dan baik. Oleh karena itu, lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan ini sehingga lingkungan menentukan kebaikan dan keburukan peserta didik. Apabila lingkungannya baik maka peserta didik dapat mengikutinya dengan mudah, misalnya ada teman yang sering beribadah maka peserta didik tersebut mengikuti tetapi kalau lingkungannya tidak baik maka peserta didik tersebut terpengaruh dan dengan mudahnya juga mengikuti lingkungan tersebut sehingga banyak peserta didik yang mabuk-mabukan, judi, perkelahian, dan perbuatan negatif lainnya.

Penguatan nilai kejujuran pada generasi muda bukan hanya tanggung jawab dan diserahkan sepenuhnya kepada guru agama dan PPKn saja melainkan kerjasama semua guru yang ada dalam sekolah dengan harapan melalui kerja sama tersebut dapat mencegah peserta didik yang melakukan

pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Pengawasan dan juga pendampingan secara rutin itu penting karena hal tersebut merupakan salah satu cara yang baik dan tepat untuk meningkatkan kesadaran peserta didik yang melakukan kesalahan. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan dari guru maka masalah yang terjadi di sekolah dapat dikurangi sehingga lingkungan sekolah menjadi damai, aman, dan sejahtera.

SIMPULAN

Upaya untuk menguatkan nilai kejujuran di sekolah adalah menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dengan membentuk kantin kejujuran dan melalui pembelajaran PPKn. Faktor yang mendukung nilai kejujuran adalah contoh dan keteladanan guru, aktivitas ibadah yang terprogram, pengajian rutin, keikutsertaan dalam organisasi, dilarang keras untuk mencontek dan menyalin di internet tanpa mencantumkan sumbernya, SOP keterlambatan, buku piket, upacara bendera, dan kegiatan ekstrakurikuler. Faktor penghambatnya adalah kantin kejujuran sering rugi, dan kurangnya pendampingan serta pengawasan dari guru. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan kerja sama antar guru, melakukan pengawasan dan pendampingan secara rutin dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, A. G. (2008). *Pembentukan Habit Menerapkan Nilai-Nilai Religius, Sosial dan Akademik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Althof, W. dan B. (2006). Moral Education and Character Education: Their Relationship and Roles in Citizenship Education. *Educating for Civic Character*, 35(4), 495–518.
- Arifin, Z. (2011). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arthur, J., & Davies, I. dan H. C. (2008). *Educating for Civic Character*. The

SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy: Educating for Civic Character, 399–410.

- Arthur, J., & Davison, J. dan M. L. (2005). *Professional Values and Practice Achieving the Standards for QTS*. London: Routledge.
- Asmani, J. M. (2012). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Bakry, N. M. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berkowitz, M. W. (2012). *Understanding effective character education*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Branson, M. S. (1998). The Role of Civic Education. *Center for Civic Education*, 5–9.
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*. Bandung: CISED.
- Darling, L. (2002). The Essential Moral Dimensions of Citizenship Education: What Should We Teach. *The Journal of Educational Thought (JET)*, 36, 2.
- Doganay, A. (2012). *Curriculum Framework for Active Democratic Citizenship Education*. Dalam Murray Print & Dirk Lange. *Schools Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens*. Rotterdam: Sense Publisher.
- Fadil, Y., & Fauzi, I. A. dan E. S. (2013). *Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik*. 1(2), 1–14.
- Gurning, N. L. M., & Mudjiman, H. dan S. H. (2014). Implementasi pendidikan Antikorupsi melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2, 1.
- Hakim S. A., dkk. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia*. Malang: Madani Kelompok Intrans Publishing.

- Halstead, P. and. (2006). *Citizenship and Moral Education*. London and New York: Roulegde Farmer.
- Handoyo, E. (2009). *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: Kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan Karakter: Konsepsi & Impelentasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. USA: Bantam Book.
- Mak, S. W. (2014). Evaluation of a Moral and Character Education Group for Primary School Students. *Discovery-SS Student E-Journal*, 3, 142–164.
- Marianto, H. D. (2002). Pendidikan Karakter: Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia Berkualitas. *Character Education: New Paradigma to Human Capacity Building*.
- Mohamed, Y. (1997). *Insan yang Suci: Konsep Fitrah dalam Islam. Terjemahan Mansyur Abadi*. Bandung: Mizan.
- N, S. dan S. (2011). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurdjana, I. G. M. (2005). *Korupsi dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurmalisa, Y. (2018). Pengaruh Interaksi Edukatif terhadap Konsep Diri Peserta Didik dalam Belajar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.*, 3, 215–219. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Patrick, J. J. dan V., & S., T. (2001). *Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teacher*. Washington D. C: Office of Educational Research and Improvement.
- Rabi, A. dan N. (2015). Pengembangan Aplikasi Computer Vision untuk Pengamanan Kantin Kejujuran. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terapan (SEMANTIK)*. ISBN:, 979, 280–281.
- Rosyada, D. (2004). *Paradigma Pendidikan Demokrasi Sebuah model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Rukiyati. (2013). Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 196–203.
- Salim M. H. dan Kurniawan, S. (2012). *Studi Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- U, S. dan W. (2004). *PKn: Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: FPIPS UPI.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Method (4rd ed.)*. California: Sage Publications Inc.